

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan pada Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis terbukti. Pemerintah Indonesia memiliki alasan-alasan lain yang memperkuat Kebijakan Penempatan TKI ABK Perikanan Taiwan yakni dengan adanya faktor internal/domestik dan faktor eksternal serta mempertimbangkan pilihan-pilihan rasional yang dianggap menguntungkan negara maupun masyarakat. Terdapat tiga poin utama alasan Pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kebijakan tersebut.

Pertama, yakni dilihat berdasarkan data yang sudah dikumpulkan peneliti dimana kepadatan penduduk Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, namun hal tersebut tidak diimbangi dengan meningkatnya kesejahteraan dan pendidikan yang diperoleh masyarakat. Selain itu lapangan pekerjaan di Indonesia masih kurang serta tidak bisa mensejahterakan masyarakat dengan pendidikan menengah kebawah. Oleh sebab itu hal tersebut mendorong masyarakat untuk bekerja sebagai TKI ABK Perikanan Taiwan serta Pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kebijakan penempatan TKI ABK Perikanan Taiwan.

Kedua, yakni dampak yang didapatkan masyarakat dan negara dalam Penempatan TKI ABK Perikanan Taiwan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan bahwa dampak ekonomi merupakan faktor utama dalam alasan menempatkan TKI ABK Perikanan Taiwan. Dengan bekerja menjadi TKI ABK Perikanan Taiwan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu bagi Pemerintah Indonesia dampak yang dirasakan adalah mendapatkan keuntungan dari remitansi yang dihasilkan para pekerja tersebut, serta dengan menempatkan TKI ABK Perikanan Taiwan akan mengurangi angka pengangguran, kemiskinan, dan secara tidak langsung dapat memunculkan lapangan pekerjaan.

Ketiga, yakni permasalahan kesejahteraan, gaji tidak dibayar dan kekerasan yang menimpa TKI ABK Perikanan Taiwan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat di tarik kesimpulan bahwa apabila penempatan TKI ABK Perikanan Taiwan ditutup, maka yang terjadi adalah permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di dalam negeri. Hal tersebut dikarenakan dengan menghilangkan lapangan pekerjaan bagi para TKI ABK Perikanan Taiwan akan berdampak langsung terhadap keluarga mereka di dalam negeri, sehingga kemiskinan dan tindak kriminalitas akan terjadi di sektor domestik. Selain itu sudah ada intensi baik dari Pemerintah Taiwan untuk memperbaiki sistemnya agar permasalahan yang menimpa ABK Perikanan dapat berkurang.

Dalam permasalahan TKI ABK Perikanan terjadi sebuah dilema yang dihadapi masyarakat dan Pemerintah Indonesia dalam pengambilan suatu kebijakan

yang tepat. Disatu sisi masyarakat membutuhkan pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan kehidupannya, serta Pemerintah Indonesia juga ingin mengurangi angka pengangguran di dalam negeri dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat maupun negara. Dengan kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia serta pendidikan masyarakat yang masih menengah kebawah, maka pekerjaan sebagai TKI ABK Perikanan Taiwan dengan gaji yang lebih tinggi serta syarat pendidikan yang tidak tinggi merupakan pilihan yang menguntungkan bagi masyarakat dan Pemerintah Indonesia untuk menempatkan TKI ABK Perikanan Taiwan.

Namun disisi lain masih terjadi permasalahan yang menimpa TKI ABK Perikanan Taiwan seperti gaji tidak dibayarkan, tindak kekerasan, kurangnya jaminan kesehatan saat bekerja, jam kerja yang tidak menentu, serta tindakan lain yang tidak manusiawi. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia merupakan aktor negara yang berkewajiban memberikan kesejahteraan serta perlindungan bagi warga negaranya dimanapun mereka berada. Namun berdasarkan analisis peneliti, memang dengan menempatna TKI ABK Perikanan Taiwan resikonya adalah permasalahan yang menimpa para pekerja itu sendiri, namun bila menutup penempatan yang terjadi adalah mereka akan kehilangan pekerjaan serta tidak bisa menafkahi keluarganya. Selain itu karena desakan kebutuhan, mereka akan tetap berangkat bekerja sebagai ABK Taiwan namun tidak melalui jalur pemerintah atau bisa dikatakan ilegal.

Jadi alasan Pemerintah Indonesia tetap mempertahankan Kebijakan Penempatan TKI ABK Perikanan Taiwan adalah alasan ekonomi, sosial dan pertahanan. Disisi lain permasalahan yang menimpa TKI ABK Perikanan Taiwan juga sudah terjawab bahwa Pemerintah Indonesia lebih menekankan pada kepentingan bersama dan berkelanjutan. Maka secara pemikiran rasional dan untung-rugi, pilihan yang diambil Pemerintah Indonesia sudah tepat dimana kebijakan tersebut lebih menguntungkan bagi negara dan masyarakat sehingga dapat mewujudkan tujuan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta hubungan baik dengan Taiwan.

4.2 Saran

Pada bagian ini peneliti membagi menjadi dua saran yakni bagi akademisi guna memperkaya ilmu akademik dan bagi praktisi atau Pemerintah Indonesia guna memperbaiki kebijakan ini.

Pertama, bagi akademisi. Dengan penelitian ini membahas mengenai anomali Kebijakan Penempatan TKI ABK Perikanan Taiwan, namun dalam penelitian ini jauh dari kesempurnaan. Jadi kedepannya para akademisi dapat membahas isu ini dengan mencari celah kekurangan dari penelitian ini. Seperti mengapa permasalahan TKI ABK Perikanan Taiwan masih terus terjadi? Apakah tidak ada pilihan lain bagi Pemerintah Indonesia selain menempatkan TKI ABK Perikanan Taiwan?. Dengan membahas celah-celah yang ada dari penelitian ini, diharapkan dapat didapatkan penelitian yang lebih sempurna dari akademisi yang lain.

Kedua, yakni bagi praktisi atau Pemerintah Indonesia. Bila dilihat memang Kebijakan Penempatan TKI ABK Perikanan Taiwan menguntungkan bagi negara dan masyarakat, namun permasalahan terhadap mereka masih terjadi. Pemerintah Indonesia seharusnya bisa lebih menjunjung tinggi perlindungan warga negaranya dengan mengurangi permasalahan yang dihadapi para TKI ABK Perikanan. Jika dilihat bahwa sampai sekarang belum ada peraturan khusus yang menaungi TKI ABK Perikanan, maka kedepannya diharapkan Pemerintah Indonesia bisa dengan segera merumuskan peraturan khusus guna melindungi hak-hak para TKI ABK Perikanan. Selain itu hingga saat ini koordinasi antar pemerintah juga masih tidak sinkron, maka dibutuhkan diskusi bersama serta tidak saling egois antar instansi. Selain itu jika memang tidak memungkinkan menempatkan TKI ABK Perikanan Taiwan sebaiknya Pemerintah Indonesia menutup penempatan tersebut namun harus diberikan solusi lainnya seperti penempatan G to G ke negara lain namun disertai pelatihan sehingga para CTKI ABK Perikanan memiliki *skill* dan kompetensi yang dibutuhkan.